



**EFEKTIVITAS SOSIALISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN DALAM
PEMERATAAN KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI
SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

AINUN NISA KAMILA

NPM 218.01.09.1.153



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2022

ABSTRAK

Ainun Nisa Kamila,2022, **Efektivitas Sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan**, Dosen Pembimbing I : Prof.Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing II : Hirshi Anadza, S.Hub.Int, M.Hub.Int.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program beasiswa dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia terutama di Kabupaten Bangkalan. Dalam mendukung pemerataan pendidikan, peran Dinas Pendidikan diperlukan salah satunya dengan mengadakan sosialisasi, meskipun dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas sosialisasi PIP dalam pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat .

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan tingkat Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kepala Sekolah SDN Campor 01 dan Kepala Sekolah SDN Kampak 02, serta empat orang tua siswa/ wali murid penerima PIP. Objek penelitian mengenai efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan PIP di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran penerima PIP adalah siswa yang sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. PIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari efektivitas sosialisasi dalam pemerataan PIP yaitu komunikasi oleh Dinas Pendidikan sebagai implementator yang berjalan efektif dan baik, efektivitas sosialisasi yang kurang maksimal akibat adanya pandemi COVID-19 dan kurangnya keterlibatan masyarakat, serta pemerataan PIP yang ditandai dengan siswa yang menerima dana PIP yang



memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari DAPODIK sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata meskipun dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal.

Kata kunci: Sosialisasi, Efektivitas, Pemerataan, Program Indonesia Pintar.



SUMMARY

Ainun Nisa Kamila,2022, **Efektivitas Sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan**, Dosen Pembimbing I : Prof.Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing II : Hirshi Anadza, S.Hub.Int, M.Hub.Int.

Program Indonesia Pintar (PIP) is a scholarship program in increasing the distribution of education in Indonesia, especially in Bangkalan Regency. In supporting equal distribution of education, the role of the Education Office is needed, one of which is by holding socialization, although in its implementation it does not go well. Therefore, the purpose of this study is to describe the effectiveness of PIP socialization in equalizing education as well as supporting and inhibiting factors.

This research use descriptive qualitative approach. The subjects of this study were the education staff at the elementary school level at the Bangkalan Regency Education Office, the Principal of SDN Campor 01 and the Principal of SDN Kampak 02, as well as four parents/guardians of students receiving PIP. The object of research is the effectiveness of socialization by the Department of Education in the distribution of PIP in elementary schools in Bangkalan Regency. Data were collected through observation, interviews and documentation methods. The validity of the data is done by triangulating the data. Data by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the target recipients of the PIP are students who comply with the technical instructions that have been set. PIP is cash assistance given to students whose parents are unable or less able to finance their children's education. The results of the effectiveness of socialization in the distribution of PIP are communication by the Education Office as an effective and good implementer, the effectiveness of socialization that is less than optimal due to the COVID-19 pandemic and lack of community involvement, as well as the

distribution of PIP which is marked by students receiving PIP funds who meet the criteria. the condition of the student's family determined by DAPODIK so that students who are not in school or whose education is hindered by costs can go to school and the realization of equitable education even though its implementation is still not optimal.

Keywords: Socialization, Effectiveness, Equity, Smart Indonesia Program.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tolak ukur dari keberhasilan berkembangnya suatu negara salah satunya dalam bidang pendidikan (Rozi, 2019). Peran pendidikan begitu besar sehingga dibutuhkan solusi yang memenuhi persyaratan dan tantangan tersebut. Salah satu hal yang mendukung terselenggaranya pendidikan adalah pemberian beasiswa atau biaya penunjang pendidikan kepada siswa yang kurang mampu (Erwinsyah, 2017). Untuk mendukung pembangunan pendidikan perlu adanya pemerataan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Guna mendukung pemerataan finansial kepada masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginisiasi Program Indonesia Pintar (PIP). Perbedaan PIP dengan beasiswa lainnya menurut Staff PIP Kabupaten Bangkalan ialah:

“Memiliki kriteria pilihan sesuai petunjuk teknis, data siswa diambil dari DAPODIK (Berdasarkan kelayakan DAPODIK dan Surat Keterangan Pusat Beasiswa dan disesuaikan peruntukannya)” (lampiran 3).

PIP ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program untuk menyelamatkan keluarga, program “Indonesia Cerdas” dan program “Indonesia Sehat untuk Pembangunan”

Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Secara garis besar, PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya (Hartini,2017). Program ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sudah ada sejak tahun 2008 (Ghia & Pebria,2020). Sehingga pada dasarnya, kemiskinan merupakan alasan utama masyarakat Indonesia tidak bisa mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan dan PIP diharap mampu untuk mengatasi masalah tersebut.

Totok Amin (2017) dari Penggiat Pendidikan Universitas Paramadina menyatakan bahwa :

“PIP dapat menekan angka putus sekolah, tetapi sejauh ini masih kurang berhasil dalam meningkatkan angka partisipasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan, dorongan anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah untuk kembali ke sekolah tidak mudah “

Oleh karena itu, PIP bisa dianggap sebagai upaya pencegahan putus sekolah oleh pemerintah. Pencegahan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa, sehingga kasus putus sekolah dan rendahnya partisipasi belajar dapat ditangani dengan baik.

Pendistribusian KIP sebagai program utama PIP secara merata diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan juga meningkatkan mutu pendidikan serta dapat menjamin peserta didik dari keluarga tidak mampu tetap bersekolah sehingga mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, pemerataan PIP menurut Ubaid Matraji (2017) Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) masih kurang baik dikarenakan pencairan

dan distribusi pemerataan PIP peran pemerintah yang terkesan bergerak sendiri tanpa ada keterlibatan publik.

Pemerataan pendidikan sendiri merupakan cakupan dari program desentralisasi sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut demi mencapai tujuan (Aristo, 2019). Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan. Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Bangkalan ini (Pawestri & Lucky, 2017), tersebar di 18 Kecamatan 8 Kelurahan dan 273 Desa .

Bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Madura (Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 Kabupaten Bangkalan menempati peringkat ketiga. IPM Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 64,11, berada di bawah Kabupaten Sumenep sebesar 66,43 dan Kabupaten Pamekasan sebesar 66,26. Sedangkan Kabupaten Sampang menempati peringkat terakhir dengan IPM sebesar 62,70. Data IPM ini dapat dijadikan pijakan untuk menilai tingkat Pendidikan karena salah satu dari tiga indikator IPM sendiri adalah pengetahuan (BPS,2020).

Pemerataan pendidikan di Kabupaten Bangkalan harusnya tidak menjadi masalah yang memprihatinkan. Karena secara geografis, Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten terdekat di Pulau Madura dengan kota terbesar kedua di Indonesia yaitu Surabaya. Sedangkan jika dilihat dari IPM, Kota Surabaya merupakan kota yang menempati urutan pertama di Jawa Timur dengan IPM

(2020) mencapai 82,23%, sedangkan Kabupaten Bangkalan berada pada urutan ke 37 dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Jawa Timur (BPS,2020).

Maka dalam hal itu, Kabupaten Bangkalan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi. Terlebih lagi, dalam Standart Nasional Pendidikan (SNP), Kabupaten Bangkalan menempati posisi terendah dengan persentase 28,7% (LPMP;2019) .Maka dari itu, hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Bangkalan dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun ”orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Di sisi lain, dalam PP 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Sehingga, dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan meliputi, pemerataan program oleh pemerintah dan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui pemberlakuan wajib belajar 12 tahun dan akses yang lebih baik menurut PP nomer 47 Tahun 2008. Ada beberapa kelompok

masyarakat yang masih takut akan kurangnya akses layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, mereka yang belum mengetahui pentingnya pendidikan, mereka yang tinggal di daerah terpencil, atau mereka yang cacat.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dilihat dari petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017 dengan jelas menyatakan bahwa tujuannya antara lain: 1) Mengurangi biaya operasional, 2) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6-21 pada saat mereka menyelesaikan pendidikan menengah, dan mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal / 12 untuk wajib belajar Proyek Percontohan Tahunan 3) Putus sekolah (drop out) atau putus sekolah karena kesulitan keuangan untuk mencegah putus sekolah, 4) Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau putus sekolah (drop out) atau Pusat Pendidikan (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan informal lainnya yang menarik peserta didik yang tidak lagi ditawarkan/kegiatan belajar.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam pemerataan menurut Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Geger menyatakan :

“dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat desa yang didampingi oleh koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dan di tingkat sekolah melakukan penyuluhan kepada kepala sekolah yang memberikan informasi mengenai mekanisme pengusulan dan pencairan PIP”.

Namun, sosialisasi PIP di Dinas Pendidikan harus lebih ditingkatkan agar pemerataan PIP di Kabupaten Bangkalan dapat tersalurkan ke semua penerima program tersebut.

Dalam prakteknya, pelaksanaan PIP perlu dievaluasi secara berkala karena ditemui beberapa kesenjangan antara pelaksanaan dan desainnya. Objek pada penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan, serta Sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bangkalan (SDN Campor 01 & SDN Kampak 02). Temuan-temuan tersebut pada kenyataannya berbeda dengan kondisi di Kabupaten Bangkalan. Dalam kenyataannya menurut Nasiruddin (2021) perwakilan Gerakan Pemuda Peduli Pendidikan (GPPP) menjelaskan bahwa

“Penerima PIP kebanyakan dikuasai oleh sekolah. Bahkan pihak sekolah terang-terangan melakukan klaim atas akses pencairan PIP dengan alasan pemerataan. Sehingga penerima yang sesungguhnya tidak merasa pernah menerima bantuan dana”.

Kasus PIP diakui masih perlu banyak pembenahan dan perbaikan. Sehingga Dinas Pendidikan mengkaji dan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai permasalahan PIP. Peran Dinas pendidikan dalam Sosialisasi kepada masyarakat dan kepala sekolah mengenai pemerataan PIP masih belum dikatakan belum maksimal. Menurut Staff PIP tingkat Sekolah Dasar menyatakan bahwa:

“Apabila terbukti ada siswa penerima PIP yang tidak termasuk dalam kriteria penerima KIP ataupun tidak memanfaatkan dana PIP sesuai dengan tujuannya maka Dinas Pendidikan bisa membatalkan jika terbukti tidak sesuai kriteria (ketika ada laporan) dan jika penerima tersebut menolak, maka ada pengembalian dana” (lampiran 3).

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan rinci mengenai Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan mengenai kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten

Bangkalan yang dirasakan oleh pemerintah daerah, Kepala Sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat, serta alternatif solusi penyelesaiannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana “EFEKTIVITAS SOSIALISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANGKALAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan di penelitian ini, maka pokok permasalahan yang diteliti melalui penelitian ada dua rumusan masalah.

1. Bagaimana efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan?

a. Komunikasi dalam sosialisasi pemerataan Kebijakan PIP di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan.

b. efektivitas sosialisasi dalam pemerataan Kebijakan PIP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan di Sekolah Dasar.

c. Pemerataan Kebijakan PIP di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan..

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan?

- a. Faktor Pendukung efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan.
- b. Faktor Penghambat efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan.
- 2) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adapun manfaat penelitian ini terdiri dari 3.

1. Secara Subyektif, bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan dan melatih kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam

menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
3. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas efektivitas sosialisasi dalam pemerataan kebijakan PIP oleh Dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Mereview hasil-hasil penelitian sebelumnya, memaparkan perspektif teoritik atau fenomena yang diangkat dalam penelitian, dan kerangka pemikiran dari konsep-konsep dalam tinjauan pustaka.

BAB 3 METODE PENELITIAN

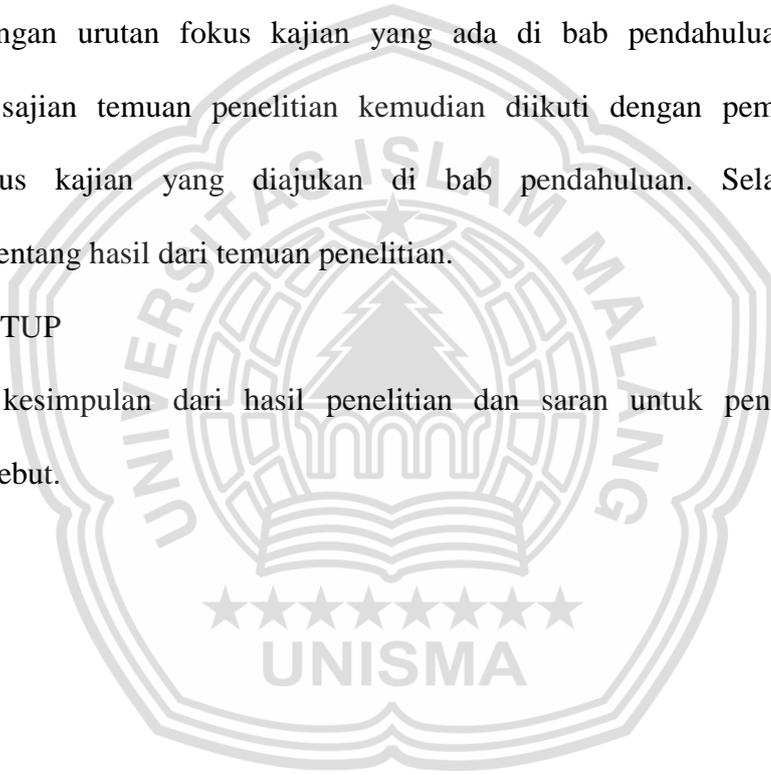
Menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB 4 TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai kondisi geografis tempat peneliti, potret kehidupan sosial ekonomi, dan sub wilayah penelitian serta menjelaskan sajian terhadap temuan penelitian dengan urutan fokus kajian yang ada di bab pendahuluan, serta Menjelaskan sajian temuan penelitian kemudian diikuti dengan pembahasan dan/atau fokus kajian yang diajukan di bab pendahuluan. Selanjutnya, menjelaskan tentang hasil dari temuan penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk peningkatan kebijakan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas sosialisasi pemerataan kebijakan PIP dikatakan berhasil jika komunikasi yang dibangun oleh implementator pelaksana kebijakan telah mencapai tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, dari tiga indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi Dinas Pendidikan telah melakukan komunikasi dengan baik sesuai tujuannya.

Namun, dalam efektivitas sosialisasi pemerataan kebijakan PIP tidak maksimal dikarenakan tidak mencapai indikator keefektifitasan yaitu penulis memfokuskan sosialisasi PIP dalam efektivitasnya Dinas Pendidikan dan pihak sekolah terhambat adanya pandemi COVID-19, input yang dilakukan tidak berjalan maksimal, proses sosialisasi terhambat karena keterbatasan gerak akibat pandemi, dan outcomes yang diharapkan kurang maksimal dikarenakan tujuan dari adanya sosialisasi PIP belum sepenuhnya terwujud dilihat dari sosialisasi oleh Pihak Dinas Pendidikan yang kurang berjalan dikarenakan COVID-19, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap PIP, sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Sekolah hanya kepada wali murid yang telah lolos dalam seleksi penerimaan PIP, sehingga terjadi miskomunikasi antara sekolah dan wali murid yang menyebabkan kesenjangan sosial antara wali murid.

Selanjutnya, Kebijakan PIP tidak dikatakan merata dikarenakan efektivitas dari sosialisasi PIP yang belum maksimal. Dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Bangkalan harus dapat memenuhi aspek penting yaitu Equality dan Equity. Equality berarti masyarakat Kabupaten Bangkalan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna masyarakat Kabupaten Bangkalan mendapatkan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah mulai di bangku SD hingga bangku SMA telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama terutama masyarakat kelas bawah. Namun implementasinya, masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PIP, serta kurang ikut andilnya pihak sekolah.

Maka dari itu, efektivitas sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan Program Indonesia Pintar masih belum dikatakan maksimal dikarenakan salah satu dari tiga komponen yaitu komunikasi dalam sosialisasi, efektivitas sosialisasi, serta pemerataan PIP yang belum mencapai indikator yang dicapai.

Selain itu, faktor pendukung efektivitas sosialisasi PIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima PIP,serta Bank penyalur yaitu Bank BRI & BNI sebagai penyalur dana pencairan PIP.

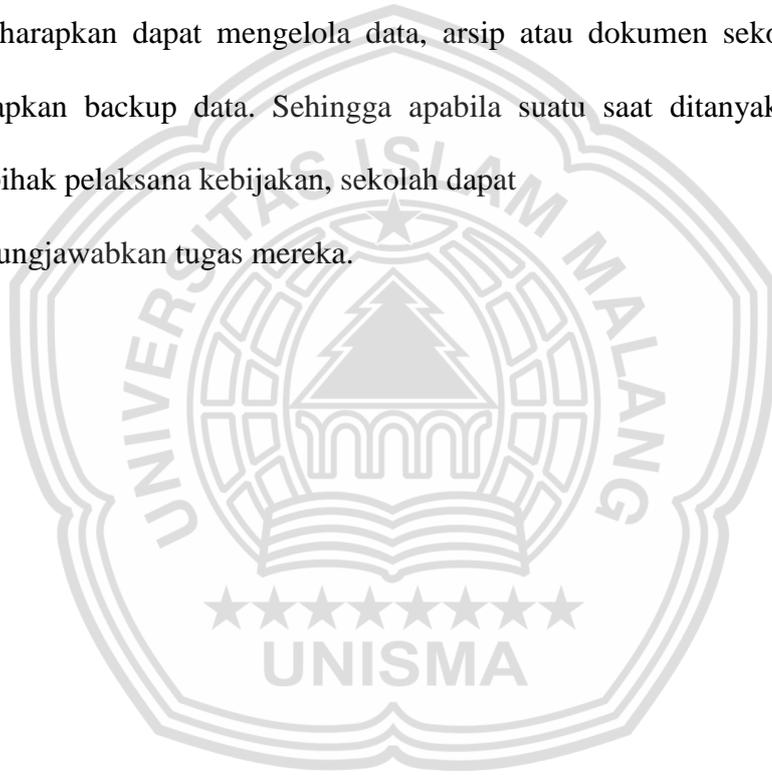
Faktor penghambat: evaluasi program PIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, tidak adanya sosialisasi terjadwal akibat adanya pandemi COVID-19, kesulitan mengumpulkan bukti pencairan dana PIP, serta masih banyak rakyat miskin yang belum menerima, karena ini merupakan penerimaan beasiswa dari DAPODIK, pihak sekolah tidak bisa menentukan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai efektivitas sosialisasi PIP, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Dinas Pendidikan seharusnya membentuk tim monitoring PIP, karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan PIP.
2. Bagi sekolah
 - a. Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima PIP dengan intensif agar siswa penerima PIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.

- b. Sekolah juga diharapkan dalam penerimaan calon PIP sekolah tidak hanya mengundang wali murid yang menerima saja, namun juga harus mengundang semua wali murid supaya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan PIP, agar semua wali murid mengetahui alur penerimaan PIP, syarat penerimaan PIP serta fungsi sekolah dalam beasiswa PIP. Sehingga tidak adanya kesenjangan sosial serta masyarakat turut berperan aktif dalam mensukseskan beasiswa PIP.
- c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan backup data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abidin, Said Zainal.2012.Kebijakan Publik. edisi 2.Jakarta : Salemba Humanika.

Budiharto,Widodo. 2010. Robotika-Teori dan Implementasinya. Yogyakarta: Penerbit Andi

Suherman.2021, Monograf Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Solok, hlm.30-36

Fitrah, Muh.Luthfiah. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat : CV Jejak

Hasan, Muhammad. 2021.Teori dan Inovasi Pendidika. Cetakan pertama. Jawa Tengah: CV Tahta Media Group.

Henimawati.2018, Model Implementasi Pentaan Reklame, Surabaya: CV.Jakad Publishing Surabaya.

Lexy, J Moleong.2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Siswanto,Edy.et.all.2021.Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Tinjauan Polkumeksosbud. Banten:Penerbit YPSIM.

Toelioe, Ansemus JE.2016.Teori dan Filsafat Pendidikan. Cetakan I.Malang: Penerbit Gunung Samudera.

Widodo.1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.

Sumber Jurnal:

Astuti, R. S. 2017. “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015 / 2016 Di Smp N 1 Semin.”
Jurnal Kebijakan Publik Edisi 2, 21–
27.<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/47597>.

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. 2018. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193- 204.

Ghia,Bella Dimmera, & Pebria Dheni Purnasari. 2020. Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *SEBATIK* 1410-3737.

Retnaningsih, Hartini.2017.Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. (*Jurnal Aspirasi* Vol 8 No. 2 Desember 2017).

Pawestri, Apriliana & Lucky Dafira Nugroho.2017. Penguatan Peran Pemerintah Desa untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Studi Pada Kabupaten Bangkalan). (*Jurnal Truojoyo* Volume 10 Nomor 2, Oktober 2017).

Perundang –undangan:

Persesjen No.20 Tahun 2021 Tentang Juklak PIP 2021

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik Jawa Timur.2021. IPM 2019-2021.
<https://jatim.bps.go.id/indicator/26/36/1/ipm.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Pamekasan 2020.
<https://pamekasankab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/08/22/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kab--pamekasan-2020.html>

Dwi, Yoga, 2019, The Seven Communicatioan Series,
<https://publicspeaking.sv.ugm.ac.id/2019/09/05/the-seven-communication-series/>. Akses 24 Februari 2022.

Kabar Madura,2021, PIP di Bangkalan Rawan Jadi Bancakan,
<https://www.kabarmadura.id>. Akses November 2021.

Kapuashulukab. 2020. Pip Bantu Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19.
<https://info.kapuashulukab.go.id/2020/10/13/pip-bantu-pelajar-pada-masa-pandemi-covid-19/>. Akses Maret 2022.

Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho,2018, Masih ada Persoalan dalam Penyauran KIP, <https://www.beritasatu.com>, Akses November 2021.

PUSLAPDIK. 2021.Nominasi Per Jenjang / SD/SMP/SMA.
https://pip.kemdikbud.go.id/nominasi/jenjang_kabupaten/05/SD?tahun=2021. Akses Maret 2022.

Sulvi Sofiana,2017, Cairkan Dana PIP untuk Siswa, Surabaya Sediakan Delapan Titik ini untuk Pembagian Rekening,<https://jatim.tribunnews.com/2017/09/26/cairkan-dana-pip-untuk-siswa-surabaya-sediakan-delapan-titik-ini-untuk-pembagian-rekening>. Akses November 2021.

